

LAPORAN MASYARAKAT KE OMBUDSMAN BALI MENURUN

Senin, 23 Desember 2019 - Dewa Made Krisna Adhi

Ombudsman Republik Indonesia Perwakilan Bali melakukan pemaparan rilis hasil kerja periode 2019, Senin, (23/12). Kepala Ombudsman Bali, Umar Ibnu Al-Khatib mengutarakan selama tahun 2019 ini terjadi penurunan pelaporan terkait pelayanan publik dibanding periode 2018.

"Di tahun 2018, ada sekitar 129 pelaporan, dan di tahun 2019 ini turun menjadi 96 pelaporan yang terverifikasi oleh tim kami. Dari laporan tersebut turun sekitar 33 pelaporan," ujarnya ketika di wawancarai di Kantor Ombudsman, Jl Melati.

Menurut pihaknya, tren penurunan ini bukan disebabkan oleh menurunnya pelaporan atas pelayanan publik, namun lebih disebabkan karena faktor internal Ombudsman sendiri yang kini proses verifikasi terhadap pelaporan di tahun 2019 dilakukan lebih ketat dari tahun-tahun sebelumnya.

"Kalau di tahun 2018 atau sebelumnya, terkait penanganan terhadap laporan kami terbilang lenggang, tetapi kini Ombudsman sudah punya peraturan tersendiri terkait laporan yang masuk," paparnya.

Dia menjelaskan aturan ini sudah berlaku dua tahun belakangan.

"Terkait penanganan yang terdahulu kalo belum memenuhi persyaratan masih bisa melakukan penanganan, sekarang sudah tidak bisa begitu," lugasnya.

Kini Ombudsman memiliki syarat untuk para pelapor. Setiap pelapor yang melakukan laporan ke Ombudsman diharapkan lebih dulu lapor kepada institusi terkait.

"Sehingga ini dapat tersaring, dan masalah yang ditangani memang keluhan baik secara formal maupun material. Kita juga menguatkan setiap institusi pelayanan publik agar terbuka menerima laporan," kata dia.

Dari 96 laporan yang diterima, sebanyak 85 laporan telah selesai dan ditutup dan 11 laporan masih dalam pemeriksaan. Pihak pelapor yang terbanyak pada bidang pendidikan (24 laporan), kepegawaian (11 laporan), dan pertanahan (15 laporan).

"Namanya juga berurusan dengan orang, ada pihak yang bertele-tele ketika kita ingin menutup. Kami juga berurusan dengan institusi kadang lama menunggu konfirmasi atasan. Jika laporan tidak terkejar ini akan jadi catatan bagi Ombudsman Bali, tapi di minggu-minggu akhir ini akan kami kejar" lugasnya. (kanalbali/KR14)